YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i4.11298

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM

The Role of the Padang City Environmental Agency in Increasing Community Participation in the Implementation of Program Kampung Iklim

Arby Rakhmatullah & Jumiati
Universitas Negeri Padang
arbycj321@gmail.com; jumiati@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 1, 2026	Jun 28, 2026	Jul 11, 2026	Jul 16, 2026

Abstract

Community participation is a determining factor in the success of climate change policies at the local level, but studies specifically examining the role of regional environmental agencies in building and sustaining such participation remain limited. This study aimed to analyse the role of the Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang in increasing community participation in the implementation of the *Program Kampung Iklim* (ProKlim), identify the constraints encountered, and describe the measures taken to address them. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Informants were selected purposively and consisted of DLH employees responsible for ProKlim, subdistrict or urban village officials, and administrators of community groups implementing ProKlim. A total of nine informants were drawn from four community groups with different levels of participation. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation and were subsequently analysed using an interactive model

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was examined through source triangulation. The results showed that the DLH had performed its roles as a facilitator, dynamizer, and catalyst through location identification, socialization, guidance, facility provision, and motivation. However, the implementation of these roles was uneven because some groups received intensive guidance and support, whereas others were merely registered without further follow-up. The main constraints included low levels of community digital literacy, the substantial administrative burden associated with ProKlim assessment, and low environmental awareness in several locations. The DLH addressed these constraints through direct assistance with reporting, gradual data collection, continuous guidance, and the involvement of local figures and active groups as agents of change. This study confirms that equitable guidance, strengthened administrative assistance, and the involvement of local actors are necessary to increase community participation in the implementation of ProKlim. These findings provide a theoretical contribution to the development of studies on community-based environmental governance as well as practical implications for the DLH Kota Padang and other regional environmental agencies in designing more equitable and sustainable guidance mechanisms. Future research may examine the effectiveness of ProKlim in achieving ecological, social, and economic outcomes across a broader geographical area.
Keywords: Climate Change Adaptation and Mitigation; Environmental Agency; Community Participation; Role of Local Government; *Program Kampung Iklim*

Abstrak: Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan perubahan iklim di tingkat lokal, tetapi kajian yang secara khusus membahas peran dinas lingkungan hidup daerah dalam membangun dan mempertahankan partisipasi tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dipilih secara purposif dan terdiri atas pegawai DLH yang menangani ProKlim, aparat kecamatan atau kelurahan, serta pengurus kelompok masyarakat pelaksana ProKlim. Sebanyak sembilan informan berasal dari empat kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi yang berbeda. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH telah menjalankan peran sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator melalui identifikasi lokasi, sosialisasi, pembinaan, penyediaan fasilitas, dan pemberian motivasi. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum merata karena sebagian kelompok memperoleh pembinaan dan dukungan secara intensif, sedangkan kelompok lainnya hanya didata tanpa tindak lanjut. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, tingginya beban administrasi penilaian ProKlim, dan rendahnya kesadaran lingkungan di sejumlah lokasi. DLH mengatasi kendala tersebut melalui pendampingan langsung dalam pelaporan, pengumpulan data secara bertahap, pembinaan berkelanjutan, serta pelibatan tokoh setempat dan kelompok yang telah aktif sebagai agen perubahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemerataan pembinaan, penguatan pendampingan administratif, dan pelibatan aktor lokal diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian tata kelola lingkungan berbasis masyarakat serta implikasi praktis bagi DLH Kota Padang dan dinas lingkungan hidup daerah lainnya dalam merancang mekanisme pembinaan yang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat

mengkaji efektivitas ProKlim terhadap capaian ekologis, sosial, dan ekonomi pada cakupan wilayah yang lebih luas.

Kata Kunci: Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; Dinas Lingkungan Hidup; Partisipasi Masyarakat; Peran Pemerintah Daerah; Program Kampung Iklim

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan hingga ke tingkat lokal, termasuk di Kota Padang. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi banjir, kekeringan musiman, banjir rob di kawasan pesisir, serta gangguan kualitas udara akibat emisi kendaraan bermotor di wilayah sekitar. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Program Kampung Iklim (ProKlim) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016, yang menempatkan kelompok masyarakat di tingkat RW/kelurahan sebagai pelaksana utama kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (MENLHK, 2016). Hingga tahun 2024, Kota Padang telah memiliki 22 kelompok masyarakat ProKlim yang tersebar di 7 dari 11 kecamatan, dengan mayoritas berada pada kategori ProKlim Madya dan satu kelompok telah mencapai kategori ProKlim Utama (Padang, 2025). Pertumbuhan jumlah kelompok tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif ProKlim di Kota Padang terus berkembang.

Keberhasilan ProKlim pada dasarnya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, karena pendekatan program ini bersifat bottom-up, di mana masyarakat berperan sebagai pelaku utama sejak tahap perencanaan hingga evaluasi (KLHK, 2021). Sebagai organisasi perangkat daerah yang berwenang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang memiliki tanggung jawab strategis untuk menjalankan peran sebagai fasilitator, katalisator, dan dinamisator guna mendorong partisipasi tersebut (Nurdin et al., 2024). Merujuk pada teori peran Kahn (1965) sebagaimana dikutip dalam (Sukarta et al., 2024), perilaku suatu organisasi ditentukan oleh tuntutan dan harapan sosial yang melekat pada posisi yang didudukinya, dengan demikian, keberhasilan DLH dalam mendorong partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana peran-peran tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten di lapangan, bukan sekadar tercantum dalam regulasi.

Penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam ProKlim telah dilakukan oleh (Nielwaty & Meriansari, 2023) di Kota Pekanbaru serta (Insaeni, 2024) di Kota

Tangerang, yang keduanya menitikberatkan pada bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai variabel utama. Penelitian (Aldrian et al., 2011) di Kabupaten Banyuwangi juga mengkaji peran dinas lingkungan hidup dalam mendorong partisipasi, tetapi terbatas pada program pengelolaan sampah. Ketiga penelitian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana peran kelembagaan pemerintah daerah dijalankan secara berjenjang dan mengapa intensitas peran tersebut dapat berbeda antar kelompok sasaran dalam satu wilayah yang sama. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji karena observasi awal peneliti menunjukkan bahwa meskipun seluruh 22 kelompok ProKlim di Kota Padang berada dalam satu program yang sama, bentuk peran yang diterima masing-masing kelompok dari DLH tidak seragam; sebagian kelompok mendapat pembinaan dan dukungan yang intensif, sedangkan kelompok lain hanya melalui tahap pendataan tanpa tindak lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengungkap variasi pelaksanaan peran DLH antar kelompok masyarakat ProKlim dalam satu kota yang sama, dengan menggunakan kerangka peran organisasi perangkat daerah sebagai fasilitator, katalisator, dan dinamisator (Nurdin et al., 2024) yang dipadukan dengan Theory of Constraints (kendala) (Martono dalam Yuliawancita, 2023) untuk memetakan kendala kelembagaan, kendala pasar/karakteristik sasaran, dan kendala kebijakan/kesadaran yang menghambat pemerataan peran tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran DLH Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan ProKlim, mengidentifikasi kendala yang dihadapi DLH dalam pelaksanaan peran tersebut, dan menganalisis upaya yang dilakukan DLH untuk mengatasi kendala yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana peran DLH Kota Padang dijalankan dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan ProKlim, tanpa perlakuan atau rekayasa terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2023). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrumental pada satu instansi (DLH Kota Padang) dengan multi-lokasi kelompok ProKlim sebagai unit analisis pembanding, sehingga variasi pelaksanaan peran antar kelompok dapat teridentifikasi secara kontekstual.

Waktu penelitian ini selama tiga bulan yaitu Mei sampai Juni 2026. Penelitian dilaksanakan di kantor DLH Kota Padang dan pada empat lokasi kelompok ProKlim dengan

karakteristik dan tingkat pembinaan yang berbeda, yaitu Pokdakan Lubuk Tempurung Indah (kategori ProKlim Utama), Kelompok Wanita Tani Kesehatan Asri, Jambak Sea Turtle Camp, dan Kelompok Wanita Tani Anggrek. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan pertimbangan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan ProKlim, terdiri atas satu pegawai Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL) DLH Kota Padang yang menangani ProKlim, serta delapan pengurus/ketua kelompok masyarakat dari empat lokasi tersebut, sehingga total informan berjumlah sembilan orang.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi partisipatif untuk mengamati langsung bentuk fasilitasi dan kegiatan adaptasi-mitigasi di lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator peran fasilitator, katalisator, dan dinamisator, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan ProKlim, formulir pendaftaran, surat edaran, foto kegiatan, dan regulasi terkait seperti Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 4 Tahun 2021 (Ratnaningtyas et al., 2021). Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi pedoman wawancara, buku catatan lapangan, alat perekam suara, dan kamera dokumentasi.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari pegawai DLH, aparat kelurahan, dan pengurus kelompok masyarakat untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan (Ratnaningtyas et al., 2023). Data dianalisis secara induktif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian naratif per kelompok masyarakat, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dengan meninjau kembali seluruh data hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pola pelaksanaan peran DLH (Miles et al., 2022).

HASIL

Distribusi dan Kategori Kelompok ProKlim di Kota Padang

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Tahun 2025, terdapat 22 kelompok masyarakat ProKlim yang tersebar pada 7 kecamatan. Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah kelompok terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Kuranji, sementara empat kecamatan lain di Kota Padang belum

memiliki kelompok ProKlim terdaftar. Dari seluruh kelompok tersebut, satu kelompok yaitu Pokdakan Lubuk Tempurung Indah telah mencapai kategori ProKlim Utama, sedangkan 21 kelompok lainnya berada pada kategori ProKlim Madya.

Tabel 1. Distribusi Kelompok ProKlim Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Kelompok	Kategori Tertinggi
Koto Tangah	8	Madya
Kuranji	6	Utama
Pauh	2	Madya
Nanggalo	2	Madya
Lubuk Kilangan	2	Madya
Lubuk Begalung	1	Madya
Padang Timur	1	Madya
Total	22	-

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang, 2025

Peran DLH sebagai Fasilitator: Identifikasi Lokasi dan Penyediaan Dukungan

Peran DLH sebagai fasilitator diwujudkan sejak tahap identifikasi lokasi yang berpotensi menjadi kampung iklim. Pegawai Bidang P2KL DLH Kota Padang menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan koordinasi bersama kecamatan dan kelurahan untuk mencari kelompok yang memenuhi kriteria ProKlim.

"...kalau dari awal, peran DLH itu kan dari awal yang pertama itu mengidentifikasi lokasi di Kota Padang ada yang potensial untuk pendidikan menjadi masuk program Kampung Iklim... karena kelompok proklim ini berada pada tingkat kelurahan atau RT/RW, DLH selalu berkoordinasi dengan Kecamatan atau Kelurahan untuk mencari kelompok mana yang memenuhi persyaratan..." (Wawancara, Pegawai P2K2L DLH, 29 Mei 2026).

Namun demikian, proses identifikasi tidak selalu diikuti tindak lanjut yang konsisten. Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kesehatan Asri dan pengelola Jambak Sea Turtle Camp sama-sama menyatakan bahwa setelah kunjungan awal untuk sosialisasi dan pengisian formulir pendataan, tidak ada lagi informasi lanjutan mengenai status kelompok mereka dalam ProKlim. Kondisi yang lebih ekstrem ditemukan pada KWT Anggrek di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, yang pengurusnya sama sekali tidak mengetahui bahwa kelompoknya telah terdaftar sebagai kelompok ProKlim, sebagaimana dikemukakan oleh ketua kelompok:

"...sama sekali tidak ada kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup ke sini, dan ibu tidak tahu kalau KWT ini tergolong ke dalam ProKlim..." (Wawancara, 18 Juni 2026).

Dalam hal penyediaan dukungan dan fasilitas, DLH memberikan bantuan berupa bibit tanaman, pakan ikan, tong kompos, biopori, dan tempat sampah kepada kelompok-kelompok yang aktif dibina. Pokdakan Lubuk Tempurung Indah, misalnya, secara konsisten menerima bantuan pakan ikan, bibit tanaman, dan kompos, serta didukung untuk mengikuti perlombaan lingkungan hidup tingkat nasional. Sebaliknya, KWT Kesehatan Asri mengaku belum pernah menerima bantuan apa pun dan mengandalkan swadaya anggota untuk seluruh kebutuhan kelompok.

Peran DLH sebagai Dinamisator: Sosialisasi, Pembinaan, dan Pendampingan

Sosialisasi dilakukan DLH dengan mengumpulkan RT/RW, tokoh masyarakat, dan kelompok sasaran pada suatu forum pertemuan, dilanjutkan dengan pembinaan teknis seperti penggunaan kompos dan pengelolaan sampah organik. Pokdakan Lubuk Tempurung Indah melaporkan menerima sosialisasi dan pembinaan dari DLH secara rutin, kurang lebih setiap tiga bulan dalam periode 2025–2026. Kelompok ini juga memperoleh pendampingan intensif yang mengantarkannya meraih kategori ProKlim Utama serta keikutsertaan pada kompetisi ProKlim tingkat nasional.

Tabel 2 merangkum perbandingan bentuk peran yang diterima oleh empat kelompok yang menjadi fokus penelitian ini, menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok antar kelompok meskipun keempatnya sama-sama berstatus kelompok ProKlim terdaftar.

Tabel 2. Perbandingan Bentuk Peran DLH yang Diterima Kelompok ProKlim

Kelompok	Sosialisasi	Pembinaan	Bantuan/Fasilitas	Akses Kompetisi
Pokdakan Lubuk Tempurung Indah	Rutin (±3 bln)	Intensif	Ada	Nasional
KWT Kesehatan Asri	Pendataan saja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sea Turtle Camp Pasia Jambak	Pendataan saja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
KWT Anggrek	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan observasi peneliti, 2026

Peran DLH sebagai Katalisator: Motivasi dan Akses Kompetisi

DLH berupaya memotivasi kelompok masyarakat melalui insentif tidak langsung, seperti potongan retribusi Layanan Persampahan (LPS) bagi warga yang melakukan

pengolahan sampah mandiri, serta melalui kompetisi antar kelompok untuk naik ke kategori ProKlim yang lebih tinggi. Sebagaimana disampaikan informan :

"...dari masyarakat yang penagihan LPS-nya Rp24.000, kalau dia melakukan pengolahan sampah, dia akan mendapatkan diskon penagihan..." (Wawancara, 29 Mei 2026).

Kelompok yang memperoleh akses pada kompetisi dan pengakuan formal, seperti Pokdakan Lubuk Tempurung Indah, menunjukkan semangat partisipasi yang tinggi dan berkelanjutan.

Ketahanan Partisipasi di Luar Peran DLH

Menariknya, penelitian ini juga menemukan data yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola umum di atas. Meskipun KWT Kesehatan Asri tidak mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari DLH dan mengalami penurunan partisipasi warga dalam kegiatan ProKlim secara formal, kelompok ini tetap mempertahankan soliditas internal dalam kegiatan gotong royong dan pertanian kelompok yang berjalan atas inisiatif mandiri. Ketua kelompok menyampaikan:

"...Alhamdulillah kami selalu kompak. Kalau ada kegiatan langsung oke... kalau bapak-bapak tidak bergerak, kami turun ke jalan. Itu memang dasar kesadaran..." (Wawancara, 18 Juni 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa modal sosial internal masyarakat dapat menjadi penyangga partisipasi meskipun dukungan eksternal dari pemerintah daerah tidak memadai.

Kendala yang Dihadapi DLH

Penelitian mengidentifikasi tiga kelompok kendala utama. Pertama, kendala sumber daya internal (internal resource constraints), berupa beban administrasi penilaian yang memuat banyak komponen data. Pegawai P2KL menjelaskan:

"...kami terkendala di pelaporan dari masyarakat, misalnya pas diminta laporan dia nggak tahu bagaimana cara pelaporannya melalui handphone karena gaptek..." (Wawancara, 29 Mei 2026).

Kedua, kendala karakteristik sasaran (*market constraints*), berupa rendahnya literasi digital sebagian anggota kelompok yang didominasi usia lanjut, serta perbedaan karakteristik generasi muda dan tua dalam kelompok yang menyulitkan proses pembinaan. Ketiga, kendala kesadaran dan kebijakan (*policy constraints*), berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat

terhadap pentingnya isu perubahan iklim, sehingga kegiatan ProKlim dianggap sebagai aktivitas tambahan, bukan kebutuhan bersama.

Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala pelaporan digital, DLH melakukan pendampingan langsung ke lokasi kelompok. Untuk mengatasi beban administrasi penilaian, data dikumpulkan secara bertahap sejak tahap sosialisasi dan kunjungan lapangan, serta dikerjakan secara kolektif oleh tim (Wawancara, 29 Mei 2026). Untuk mengatasi rendahnya kesadaran lingkungan, DLH melakukan pembinaan berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat serta kelompok yang telah aktif sebagai contoh bagi kelompok lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui proses identifikasi lokasi dan penyediaan dukungan kepada kelompok masyarakat. Tahap identifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menentukan kelompok yang memenuhi kriteria Program Kampung Iklim (ProKlim). Peran ini sejalan dengan pendapat (Nurdin et al., 2024; Sagala, 2024) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat melalui pemberian fasilitas, pembinaan, dan pendampingan agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam program pembangunan. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4 Tahun 2021 menegaskan bahwa keberhasilan ProKlim sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa proses identifikasi tersebut belum diikuti oleh tindak lanjut yang merata pada seluruh kelompok masyarakat. Temuan mengenai KWT Anggrek dan Sea Turtle Camp Pasia Jambak yang tidak memperoleh informasi lanjutan menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi yang dijalankan DLH masih menghadapi tantangan dalam aspek pemerataan pelayanan.

Ketimpangan dalam pemberian bantuan dan fasilitas kepada kelompok ProKlim menunjukkan bahwa peran fasilitator belum terlaksana secara optimal. Pokdakan Lubuk Tempurung Indah memperoleh berbagai bentuk dukungan berupa bibit tanaman, pakan ikan, kompos, serta kesempatan mengikuti kompetisi tingkat nasional, sedangkan kelompok lain belum menerima fasilitas serupa. Kondisi ini bertentangan dengan konsep pemberdayaan

masyarakat yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2012; Suharto, 2021), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara inklusif dan berkesinambungan agar seluruh kelompok sasaran memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Menurut (Kholil, 2024) juga menyebutkan bahwa peran dinas lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga memastikan distribusi bantuan dan pembinaan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat partisipasi antarkelompok karena akses terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program lingkungan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi bantuan agar seluruh kelompok ProKlim memperoleh pendampingan yang setara.

Peran DLH Kota Padang sebagai dinamisator diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdakan Lubuk Tempurung Indah memperoleh sosialisasi dan pembinaan secara rutin setiap tiga bulan, sehingga mampu mencapai kategori ProKlim Utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Indriyani, 2014) yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai dinamisator bertugas menggerakkan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Menurut (Nikmah, 2018; Jazuli et al., 2023), pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus mampu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam suatu kegiatan kolektif. Di sisi lain, kelompok seperti KWT Kesehatan Asri dan Sea Turtle Camp Pasia Jambak hanya menerima pendataan tanpa pembinaan lanjutan. Perbedaan intensitas pembinaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kelompok dalam ProKlim sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan menjadi aspek penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi Program Kampung Iklim.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa DLH menjalankan peran sebagai katalisator melalui pemberian motivasi dan insentif kepada masyarakat. Salah satu bentuk motivasi yang diberikan adalah potongan retribusi Layanan Persampahan (LPS) bagi masyarakat yang melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Selain itu, DLH mendorong kelompok masyarakat untuk mengikuti kompetisi ProKlim guna meningkatkan status dan pengakuan terhadap kelompok tersebut. Menurut (Sagala, 2024), pemerintah memiliki fungsi katalisator yang bertujuan mempercepat perubahan sosial melalui pemberian motivasi dan dorongan kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 Tahun 2016 yang menempatkan partisipasi

masyarakat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan ProKlim. Kelompok yang memperoleh akses terhadap kompetisi dan penghargaan, seperti Pokdakan Lubuk Tempurung Indah, menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif dan penghargaan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program lingkungan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan fakta menarik bahwa partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah. KWT Kesehatan Asri tetap mempertahankan solidaritas dan kegiatan gotong royong meskipun tidak memperoleh pembinaan yang berkelanjutan dari DLH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan partisipasi. Temuan ini mendukung pandangan (Mulyana, 2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif, rasa memiliki, dan semangat gotong royong yang tumbuh dari dalam komunitas. Dalam penelitian (Gunawan & Subadi, 2021; Malihah, 2019) juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah, tetapi juga oleh kekuatan solidaritas sosial masyarakat. Dengan adanya modal sosial yang kuat, masyarakat tetap mampu menjalankan berbagai kegiatan lingkungan meskipun dukungan eksternal belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial yang telah berkembang di dalam komunitas.

Penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi DLH Kota Padang dalam melaksanakan ProKlim, yaitu keterbatasan sumber daya internal, rendahnya literasi digital masyarakat, dan rendahnya kesadaran terhadap isu perubahan iklim. Kendala administrasi dan pelaporan digital menjadi tantangan utama karena sebagian besar anggota kelompok merupakan masyarakat lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Situasi ini sejalan dengan temuan (Nielwaty, 2023; Ramaiyani, 2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya kemampuan teknis masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim. Selain itu, (Aldrian et al., 2011) menjelaskan bahwa keberhasilan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memerlukan dukungan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Menyadari kendala tersebut, DLH melakukan berbagai upaya seperti pendampingan langsung, pengumpulan data secara bertahap, serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam

membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kerangka peran organisasi perangkat daerah dengan menunjukkan bahwa ketiga peran (fasilitator, katalisator, dinamisator) perlu dianalisis tidak hanya dari ada-tidaknya pelaksanaan, tetapi juga dari pemerataannya lintas kelompok sasaran. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan agar DLH Kota Padang menyusun basis data pemantauan berjenjang yang memuat status pembinaan setiap kelompok ProKlim, sehingga kelompok yang belum tersentuh pembinaan seperti KWT Anggrek dan jambak Sea Turtle Camp dapat menjadi prioritas program ke depan. Penguatan kapasitas SDM DLH dan digitalisasi pelaporan yang lebih ramah pengguna bagi kelompok lanjut usia juga menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada empat dari 22 kelompok ProKlim yang ada di Kota Padang serta menitikberatkan pada perspektif administrasi publik tanpa mengukur efektivitas ekologis program secara kuantitatif, seperti volume emisi yang berhasil diturunkan. Oleh karena itu, generalisasi temuan terhadap keseluruhan kelompok ProKlim di Kota Padang perlu dilakukan dengan hati-hati, dan penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas serta pendekatan campuran (*mixed-method*) disarankan untuk memperkuat validitas eksternal temuan ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah menjalankan peran sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program Kampung Iklim, melalui identifikasi lokasi, sosialisasi, pembinaan, penyediaan fasilitas, dan pemberian motivasi. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum merata; kelompok yang sudah aktif dan matang cenderung menerima pembinaan lebih intensif dibandingkan kelompok yang justru paling membutuhkan pendampingan, seperti terlihat pada perbandingan antara Pokdakan Lubuk Tempurung Indah dengan KWT Kesehatan Asri, jambak Sea Turtle Camp, dan KWT Anggrek. Kendala utama yang dihadapi DLH meliputi beban administrasi penilaian (*internal resource constraints*), rendahnya literasi digital dan perbedaan karakteristik generasi dalam kelompok masyarakat (*market constraints*), serta rendahnya kesadaran lingkungan pada sebagian kelompok (*policy constraints*). DLH telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pendampingan pelaporan

secara langsung, pengumpulan data bertahap, pembinaan berkelanjutan, dan pelibatan tokoh masyarakat maupun kelompok yang telah aktif sebagai agen penggerak.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) memperluas kerangka teori peran organisasi perangkat daerah dengan dimensi pemerataan pelaksanaan peran lintas kelompok sasaran; (2) menyediakan bukti empiris bahwa modal sosial lokal dapat menopang keberlangsungan kelompok masyarakat meskipun pendampingan pemerintah tidak optimal; dan (3) menawarkan pemetaan kendala kelembagaan berbasis Theory of Constraints yang dapat direplikasi pada evaluasi program berbasis masyarakat lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel ke seluruh kelompok ProKlim di Kota Padang, menggunakan pendekatan campuran untuk mengukur korelasi antara intensitas pembinaan dan capaian adaptasi-mitigasi secara kuantitatif, serta mengeksplorasi peran modal sosial masyarakat sebagai faktor penyeimbang ketika dukungan kelembagaan pemerintah terbatas.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan Program Kampung Iklim dengan cakupan wilayah dan jumlah informan yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara lebih mendalam hubungan antara peran pemerintah daerah, modal sosial, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi pengaruh literasi digital, kepemimpinan komunitas, dan kapasitas kelembagaan terhadap keberhasilan implementasi ProKlim. Kajian mengenai efektivitas kebijakan insentif lingkungan yang diterapkan pemerintah daerah juga penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat ditemukan model pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Aldrian, E., Karmini, M., & Budiman. (2011). *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*. Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. https://perpustakaan.bmkg.go.id/buku/adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-indonesia

Assidiqi, A. H., Jazuli, A., Salsabila, A. Y., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating Fastabiqul Khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *Education and Human Development Journal, 8*(2), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. (2025). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang 2025*.

Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora.

Gunawan, R., & Subadi, W. (2021). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bak Air di RT 15 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 4*(1), 521–528. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/424

Indriyani, A. (2014). Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 2*(2), 2306–2318. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/1063

Isnaeni, M. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di RW 011 Kelurahan Karang Tengah Kota Tangerang* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83239

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim*. https://jdih.kehutanan.go.id/new2/home/portfolioDetails3/P.84.pdf/84/2016/4/774

Kholil, M. (2024). *Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro]. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9125/

Malihah, D. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Cilacap Jawa Tengah* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63220

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mulyana, S. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/8978/

Nielwaty, E., Meriansari, F., & Hermanto. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim): Studi pada RW 12 Kelurahan Umbansari Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 3*(2), 43–56. https://doi.org/10.58707/jipm.v3i2.458

Nikmah, U. (2018). Peran Guru dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan, 6*(1), 23–31.

Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4*(1), 66–78. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81

Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Sagala, E. Y. (2024). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/78650/

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Sukarta, M. A. P., Dananjaya, I. B. G., & Setyastrini, N. L. P. (2024). Role Stress dan Turnover Intention: Studi Empiris Menggunakan Perspektif Teori Peran. *Analisis, 14*(2), 340–358. https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/analisis/article/view/4517

Yani, R. (2021). *Upaya Peningkatan Kemampuan Mempelajari Huruf Hijaiyah pada Remaja Masjid Taqwa di Desa Gunung Kembang Lama Kecamatan Bulan Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup]. https://e-theses.iaincurup.ac.id/2879/

Yuliawancita. (2023). *Analisis Theory of Constraint (TOC) untuk Meningkatkan Profitabilitas pada Usaha Jati Mandar Majene* [Undergraduate thesis, Universitas Sulawesi Barat]. https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/922